

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pada lampiran VI bagian E.1.1 dan E.1.2 menyatakan bahwa Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir Renja SKPD kepada kepala Bappeda, dan Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan-rancangan akhir Renja SKPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SOPD dengan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi daerah agar sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, dan sesuai dengan amanat yang sudah dituangkan dalam aturan perundangan maka Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan telah menyelesaikan susunan Laporan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2025.

Demikian Laporan Rancangan Akhir Renja SKPD Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini kami sampaikan, kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap SKPD Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Balangan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	2
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD	6
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	31
3. Analisis Sosiasal Ekonomi SKPD.....	54
4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	57
5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	60
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	69
2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	70
3. Program dan Kegiatan.....	71
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup TA.2024	75
BAB V PENUTUP	82

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan bidang lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang berkualitas yang melibatkan berbagai pihak baik Perencana, Pengambil Keputusan, Penegak Hukum dan Pejabat Pemerintah, maupun dunia usaha serta masyarakat. Oleh karenanya kesamaan persepsi dan sikap semua pihak yang terlibat dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup perlu dibina agar pengelolaan dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana Kerja (Renja) mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatan organisasi, terutama dalam mencapai tujuan akhir organisasi.

Setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja), suatu satuan kerja dapat membangun strateginya sebagai bagian terpenting dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708-Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
17. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018)
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan bagi setiap unit atau PNSD di lingkungan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam menyusun perencanaan pembangunan dan pelayanan tahunan masing-masing sub satuan kerja. Sedangkan tujuannya antara lain untuk:

1. Menyiapkan antisipasi perubahan yang akan terjadi secara pro-aktif;
2. Membangun strategi pencapaian hasil kerja tahun 2025;
3. Memberikan komitmen pada aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025;
4. Meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antar sub satuan kerja atau antar PNSD lingkup Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
5. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Untuk menjabarkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan serta memperhatikan situasi-situasi internal dan eksternal tahun berjalan;
7. Untuk menyusun pedoman pencapaian kinerja tahunan sebagai aktualisasi dari Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara sistematis, terencana, terarah dan berkesinambungan, sekaligus menampung aspirasi masyarakat dan integrasi dengan program/kegiatan sektor lainnya (lintas sektor).

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bagian ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD. Selain itu bab ini juga memuat analisis Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

Pada bab ini berisi telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; Program dan Kegiatan.

BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

Pada bab ini menggambarkan indikator kinerja yang akan dicapai SKPD dikaitkan dengan target renstra periode berjalan.

BAB V. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Pada bab ini berisi dana indikatif tahun berjalan dan prakiraan maju.

BAB VI. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai sumber dana yang dibutuhkan dalam menjalankan program dan kegiatan di SKPD pada tahun berjalan.

BAB VII. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis yang telah disusun. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan selama tahun 2023.

A. Realisasi Kinerja

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100%	100%	100%	306.677.100	281.067.100	91,65%	25.610.000
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	306.677.100	281.067.100	91,65%	25.610.000
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	306.677.100	281.067.100	91,65%	25.610.000
2.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	100%	100%	100%	10.500.000	8.030.000	76,48%	2.470.000
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	10.500.000	8.030.000	76,48%	2.470.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	10.500.000	8.030.000	76,48%	2.470.000
3.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	100%	100%	100%	262.247.200	203.897.900	77,75%	58.349.300
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	100%	100%	100%	262.247.200	203.897.900	77,75%	58.349.300
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	262.247.200	203.897.900	77,75%	58.349.300

4.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100%	100%	100%	52.702.000	52.612.000	99,83%	90.000
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	52.702.000	52.612.000	99,83%	90.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1 Laporan	1 Laporan	100%	52.702.000	52.612.000	99,83%	90.000
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	100%	11.218.549.750	10.378.482.142	88,67%	840.067.608
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	102.738.000	91.096.000	90,16%	840.067.608
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	62.838.000	58.998.000	93,89%	3.840.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%	39.900.000	32.098.000	80,45%	7.802.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	7.335.054.650	7.033.193004	95,88%	301.861.646
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	45 Orang	100%	7.280.954.650	6.989.243.204	95,99%	291.711.446
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4 Laporan	100%	30.400.000	21.449.900	70,56%	8.950.100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4 Laporan	100%	23.700.000	22.499.900	94,94%	1.200.100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	48.000.000	44.000.000	91,67%	4.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	8 orang	80	48.000.000	44.000.000	91,67%	4.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	75	75	2.501.906.600	2.207.944.562	88,25%	293.962.038
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 paket	13 paket	100	474.283.100	453.812.361	95,68%	20.470.739
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	100	15.914.900	15.914.800	100%	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	8.356.600	6.620.000	79,22%	1.736.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	494 Laporan	450 Laporan	91,09	2.003.352.000	1.731.597.401	86,44%	271.754.599
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	627.262.500	461.867.811	73,63%	165.394.689
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%	32.515.200	19.875.000	61,13%	12.640.200
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%	152.242.600	125.339.867	88,33%	26.902.733
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	44.077.400	24.911.644	56,52%	19.165.756
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	398.427.300	291.741.300	73,22%	106.686.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	603.588.000	540.380.765	89,53%	63.207.235
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 Unit	15 Unit	100%	340.331.800	280.192.805	82,33%	60.138.995
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit	100%	263.256.200	260.187.960	98,83%	3.068.240
7.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100%	100%	100%	595.430.000	588.103.000	98,77%	7.327.000
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	595.430.000	588.103.000	98,77%	7.327.000

	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	211.860.000	207.960.000	98,16%	3.900.000
	Pembukaan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	383.570.000	380.143.000	99,11%	3.427.000
8.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	100%	100%	100%	1.068.015.300	969.986.530	90,82%	98.028.770
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	977.778.900	884.069.730	90,42%	93.709.170
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	152.815.500	117.245.200	76,72%	35.570.300
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	58.189.800	55.063.800	94,63%	3.126.000
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	766.773.600	711.760.730	92,83%	55.012.870
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	45.300.000	42.314.100	93,41%	2.985.900
	Pemberian Informasi Peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100%	45.300.000	42.314.100	93,41%	2.985.900
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	44.936.400	43.602.700	97,03%	1.333.700
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	44.936.400	43.602.700	97,03%	1.333.700
9.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	100%	100%	100%	6.673.715.400	5.478.958.775	82,10%	1.194.756.625
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	6.673.715.400	5.478.958.775	82,10%	1.194.756.625
	Pengelolaan Kebun Raya	8.4 Ha	8.4 Ha	100%	555.327.800	515.726.796	92,87%	39.601.004
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	112.221 Ha	112.221 Ha	100%	6.118.387.600	4.963.231.979	81,12%	1.155.155.621
10.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100%	100%	100%	67.145.700	66.789.300	99,47%	356.400
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	100%	100%	100%	35.629.900	35.393.500	99,34%	236.400
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	4 Laporan	4 Laporan	100%	35.629.900	35.393.500	99,34%	236.400
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	31.515.800	31.395.800	99,62%	120.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	31.515.800	31.395.800	99,62%	120.000
11.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100%	100%	100%	108.492.700	107.337.200	98,93%	1.155.500
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	108.492.700	107.337.200	98,93%	1.155.500
	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	12 Dokumen	29 Dokumen	241,67%	52.399.900	51.254.600	97,81%	1.145.300

	Pengawasan Usaha dan/atauKegiatan yang IzinLingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 Laporan	7 Laporan	100%	56.092.800	56.082.600	99,89%	10.200
12.	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	100%	100%	100%	20.186.500	7.350.000	36,41%	12.836.500
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	100%	100%	20.186.500	7.350.000	36,41%	12.836.500
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atauPengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20.186.500	7.350.000	36,41%	12.836.500
13.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100%	100%	100%	25.338.000	1.346.400	5,31%	23.991.600
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	25.338.000	1.346.400	5,31%	23.991.600
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	140 Orang	140 Orang	100%	25.338.000	1.346.400	5,31%	23.991.600
14.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100%	100%	100%	127.957.000	104.788.000	81,89%	23.169.000
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	127.957.000	104.788.000	81,89%	23.169.000
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropidalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5 Entitas	5 Entitas	100%	127.957.000	104.788.000	81,89%	23.169.000
15.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100%	100%	100%	42.480.000	42.465.000	99,96%	15.000
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	42.480.000	42.465.000	99,96%	15.000
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3 Dokumen	300%	42.480.000	42.465.000	99,96%	15.000
16.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	99%	90%	92,32%	14.197.697.880	13.779.422.777	97,05%	418.275.103
	Pengelolaan Sampah	99%	90%	92,32%	14.197.697.880	13.779.422.777	97,05%	418.275.103
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	12 Laporan	12 Laporan	100%	917.919.600	882.025.212	96,09%	35.894.388
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	14.58 Ton	14 Ton	96,02%	5.458.999.980	5.404.432.081	99,00%	54.567.899
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	214 Unit	214 Unit	100%	7.820.778.300	7.492.965.484	95,81%	327.812.816

B. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan pada tahun 2023 berjumlah Rp **34.777.134.530,-** Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. **32.070.637.124,-** atau sekitar **92,22%**. Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2023 sebagai berikut:

Sasaran	Anggaran		
	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.	34.777.134.530,-	32.070.637.124,-	92,22
Meningkatnya Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah			

C. Analisis Efisiensi

Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.	92,22%	32.070.637.124,-	Efisiensi

2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	50,30	50	99,40	51,33	102,25
		Indeks Kualitas Udara	91,16	93,97	103,08	91,93	100,97
		Indeks Kualitas Lahan	55,67	51,94	93,29	51,60	95,57
2	Meningkatnya Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	100%	90	90	*Na	*Na

Keterangan : * Indikator Baru.

Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2023, terdapat 1 (satu) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar ($\geq 100\%$), Sementara itu, terdapat 3 (tiga) indikator belum memenuhi target. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor kendala. Capaian tertinggi diraih pada indikator kinerja Indeks Kualitas Udara dengan persentase 103,08%. Sementara itu 3 (tiga) indikator yang belum memenuhi target adalah Indeks Kualitas Air dengan capaian 93,97%, Indeks Kualitas Lahan dengan capaian 93,29% dan untuk Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah daerah sebesar 90%.

INDIKATOR KINERJA SASARAN :

1. Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Balangan

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Balangan, dilakukan di 2 (dua) sungai, yakni sungai Balangan dan sungai Pitap. Kegiatan pemantauan sungai di Kabupaten Balangan ditetapkan sebanyak 14 (empat belas) titik sampling dan 1 (satu) titik sampling pada danaudengan waktu sampling yang dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun.

Adapun titik pemantaun untuk perhitungan atau penilaian IKA, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan mengambil dari Sungai Balangan dan Sungai Pitap dengan total 6 (enam) titik, frekuensi pemantauan 2 (dua) kali dalam setahun.

Serta pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan ada penambahan 3 (tiga) titik dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam setahun.

Titik – titik pemantauan tersebut, antara lain:

1. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Balangan 6 (enam):

a. Sungai Balangan :Hulu di Mantuyan, Tengah di Mungkur Uyam dan Hilir di Teluk Karya.

b. Sungai Pitap : Hulu di Simpang Bumbuan, Tengah di Puduk dan Hilir di Muara Pitap.

2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel :

Sungai Balangan :Hulu di tabuan, Tengah di Kapul dan Hilir di Paringin Kota.

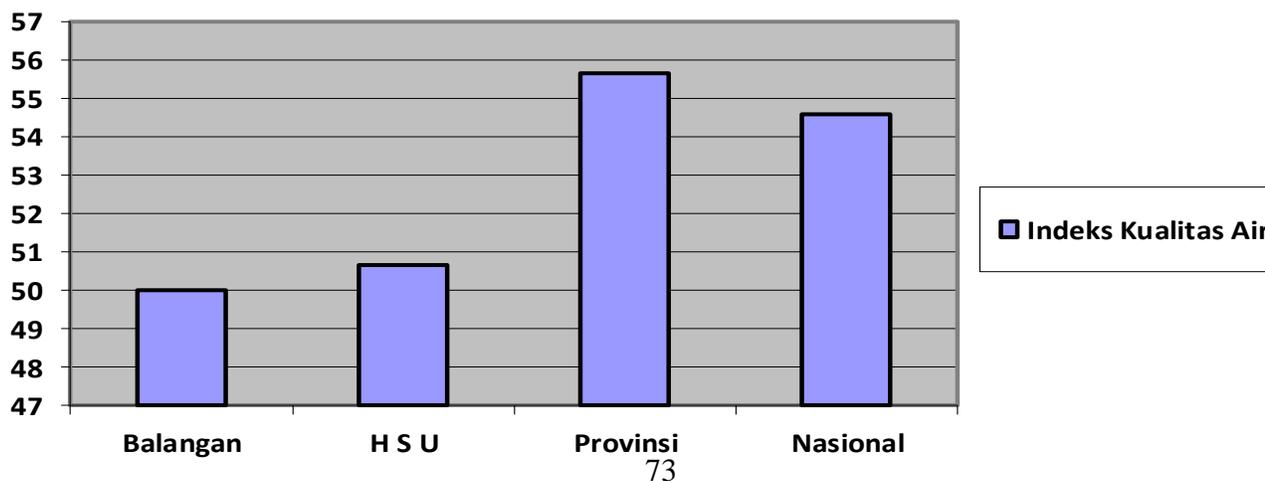
Sedangkan 8 (depalan) titik lainnya menjadi bahan pendukung pemantauan bidang pengendalian pencemaran pengelolaan limbah dan kerusakan lingkungan hidup. Berikut lokasi samplingtitik pemantauan pada kegiatan pemantauan sungai di Kabupaten Balangan tahun 2023 :

Grafik : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023



Berdasarkan grafik Perhitungan Indek Kualitas Air (IKA Existing), diperoleh nilai Indeks Kualitas Air (**IKA**) di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar **50.00 (kategori sedang)**. Nilai IKA pada tahun 2023 mengalami penurunan **1.33** dibandingkan nilai IKA di tahun **2022** yaitu **51.33 (kategori sedang)**. Penurunan nilai IKA di tahun 2023 di pengaruhi oleh parameter *Fecal Coli*, nilai *Fecal Coli* tinggi karena masih banyak masyarakat yang Buang Air Besar (BAB) ke sungai dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan air sungai.

Grafik : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2023 Kab, Provinsi dan Nasional



Tabel. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Indikator Indeks Kualitas Air

No	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	68,02	68,24	100,32	1.068.015.300	969.986.530	90,82	Efisiensi
		Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	100	100	100	67.145.700	66.789.300	99,47	Efisiensi
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	100	100	100	108.492.700	107.337.200	98,93	Efisiensi
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	100	100	25.338.000	1.346.400	5,31	Tidak Efisiensi
		Program Pengelolaan Persampahan	99	92,42	93,35	14.197.697.880	13.779.422.777	97,05	Efisiensi

2. Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Balangan

Kualitas udara ambient di Kabupaten Balangan sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Sumber pencemaran udara perkotaan berasal dari sumber bergerak yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan pembakaran mesin. Polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berupa senyawa CO, HC, SO₂, NO₂ dan partikulat.

Untuk mengetahui kualitas udara, maka perlunya dilakukan pemantauan kualitas udara. Pemantauan kualitas udara dapat dilakukan dengan metode sesaat dan metode Passive Sampler. Sementara itu, untuk mendapatkan data IKU, metode yang dilakukan yakni dengan menggunakan Passive Sampler. Passive Sampler merupakan program yang dilaksanakan oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan sebagai pelaksana teknis dilapangan, sedangkan untuk pengujian parameter, diserahkan kepada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.

Pemantauan udara dengan metode Passive Sampler dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari berturut-turut. Kegiatan ini dilakukan selama 2 (dua) kali dalam setahun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan 1 (satu) kali dalam setahun dilaksanakan oleh

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2023, KLHK dilaksanakan pada bulan Juli (tahap I) dan pada bulan September (tahap II), sedangkan DLH Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Oktober (tahap I). Pemantauan kualitas udara di Kabupaten Balangan dilakukan pada 4 (empat) titik lokasi :

1. Kawasan Perkantoran (Depan Kantor Dinas Pertanahan dan LH Kab. Balangan)
(S -2.361139 E 115.470806)
2. Kawasan Permukiman (Perumahan SKB Paringin)
(S -2.331805E 115.463666)
3. Kawasan Industri (Simpang Paringin Over Pass)
(S -2.296725 E115.475278)
4. Kawasan Padat Transportasi (Depan Terminal Besar Paringin)
(S -2.336167 E 115.459667)

Parameter yang dianalisa sebagai data IKU yaitu **NO₂** dan **SO₂**

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten/Kota dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. melakukan perhitungan rata-rata masing-masing parameter Nitrogen Dioksida (NO₂), dan Sulfur Dioksida (SO₂) dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi sampling sehingga didapat data rata-rata untuk area transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran;
2. melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) untuk masing-masing kabupaten/kota sehingga menghasilkan nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota;
3. melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) untuk provinsi yang merupakan perhitungan rata-rata nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota;
4. melakukan perbandingan nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) provinsi atau nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) kabupaten/kota dengan baku mutu udara ambien Referensi EU untuk mendapatkan Indeks Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Indeks Sulfur Dioksida (SO₂). Rata-rata Indeks Nitrogen

Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) menghasilkan Index Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dikonversikan ke Indeks Kualitas Udara IKU;

5. Indeks Udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$$

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$$

$$\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$$

$$\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$$

Untuk perhitungan IKU Kab/Kota, maka

- Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari 4 lokasi
- Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari 4 lokasi
- Bakumutu NO₂ = 20
- Bakumutu SO₂ = 40
- ***Indeks kualitas udara = 100 - {50/0.9 (ieu - 0.1)}**

Hasil Sampling Parameter NO₂ dan SO₂ pada beberapa lokasi sampling di Kabupaten Balangan untuk dua tahap pemantauan dapat dilihat pada Tabel .Hasil Sampling Parameter NO₂ dan SO₂.

Tabel . Hasil Sampling Parameter NO₂ dan SO₂ tahun 2023

No	Kab/Kota	Lokasi Sampling	KLHK				DLH Provinsi Kalimantan Selatan	
			Tahap I	Tahap 2	Tahap I	Tahap 2	Tahap I	Tahap I
			SO ₂	SO ₂	NO ₂	NO ₂	SO ₂	NO ₂
1	Kab. Balangan	Transportasi (A)	3.83	4.24	10.37	14.15	0.94	12
		Industri (B)	6.25	5.08	9.13	16.39	1.4	7.3
		Perumahan (C1)	5.00	6.93	8.16	11.54	2.0	6.1
		Perkantoran (C2)	<2.57	4.02	4.65	8.92	1.5	4.1

Tabel . Perhitungan IKU (Parameter SO₂ dan NO₂)

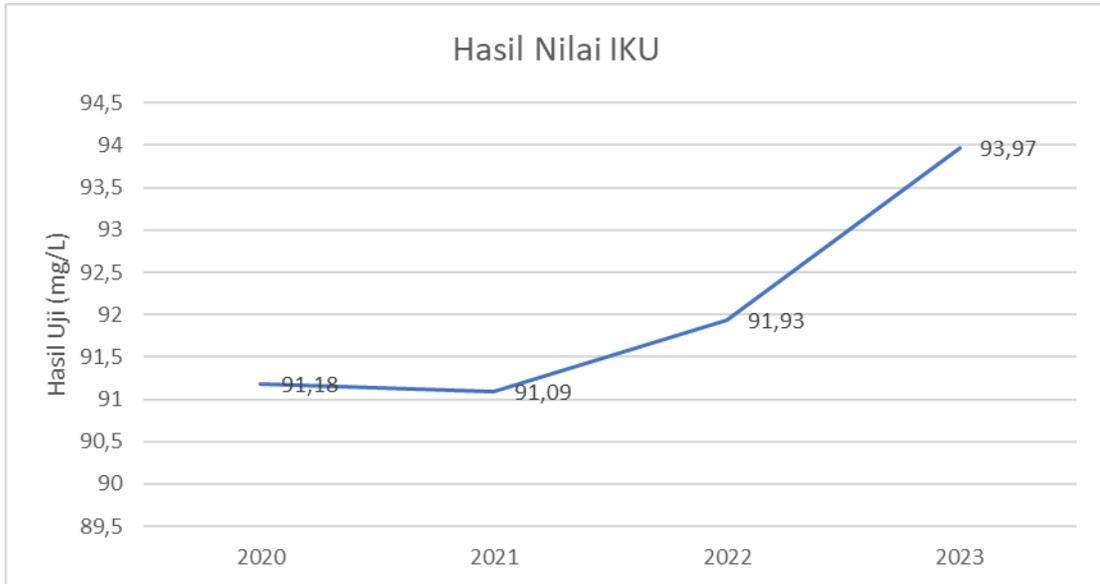
No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks					IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu		Rataan	
		NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioksida)	NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioksida)	INDEKS	
1	Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan	9.40	3.64	0.24	0.18	0.21	93.97

KATEGORI INDEKS KUALITAS UDARA

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100
2.	Baik	70 ≤ x < 90
3.	Sedang	50 ≤ x < 70
4.	Kurang	25 ≤ x < 50
5.	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25

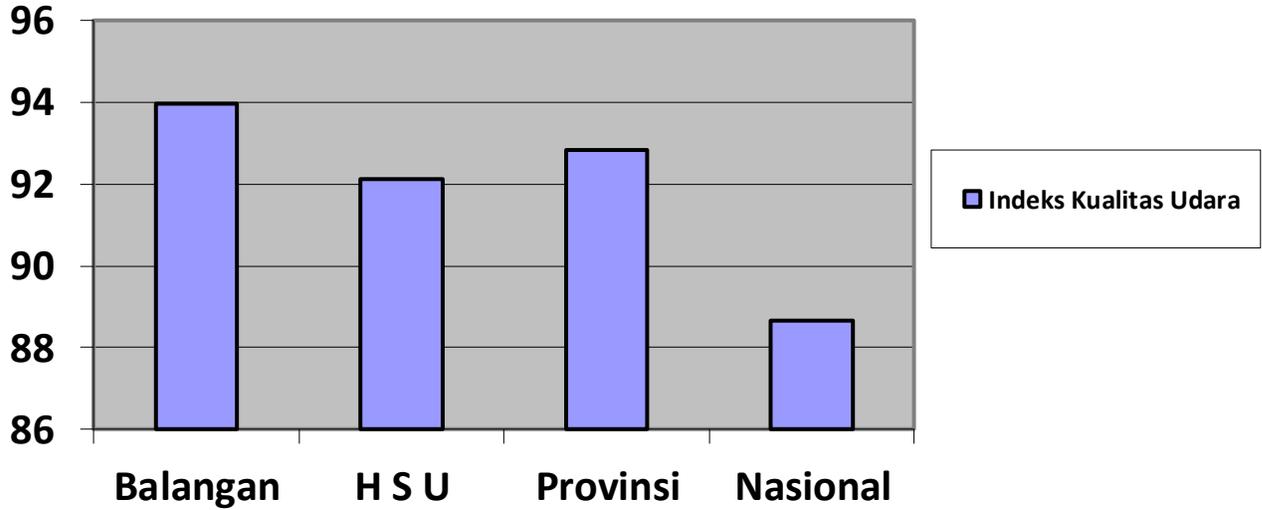
Sumber : Permenlhk RI nomor 27 tahun 2021 tentang IKLH

Grafik : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023



Berdasarkan Grafik. Perhitungan IKU (Parameter SO_2 dan NO_2), nilai IKU Kab. Balangan tahun 2023 adalah **93.97**, jika dibandingkan ke dalam rentang kategori IKU pada tabel diatas, maka dengan ini dapat di simpulkan bahwa untuk **Indeks Kualitas Udara (IKU)** Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah Kategori **Sangat Baik**. Hasil IKU tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar **2.04** dibandingkan tahun **2022** adalah **91.93**. Nilai IKU dapat di pengaruhi oleh sumber emisi udara, kondisi cuaca, suhu, curah hujan, dan aktivitas manusia. Kenaikan indeks kualitas udara dipengaruhi oleh curah hujan yang lebih sering pada tahun 2023. Air hujan secara alamiah dapat mengurangi partikel pencemar di udara.

Tabel : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 Kab, Provinsi dan Nasional



Grafik : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 Kab, Provinsi dan Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi Terhadap Provinsi	Realisasi Terhadap Nasional
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Udara	91,16	93,97	92,13	92,85	88,67

Berdasarkan grafik perbandingan capaian kinerja indeks kualitas Udara tahun 2023 Kabupaten Lain, Provinsi dan Nasional dimana Indeks Kualitas Udara Kab. Balangan sangat baik dari capaian Kabupaten lain, Provinsi dan Nasional.

Tabel. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Indikator Indeks Kualitas Udara

No	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	68,02	68,24	100,32	1.068.015.300	969.986.530	90,82	Efisiensi
		Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	100	100	100	67.145.700	66.789.300	99,47	Efisiensi
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	100	100	100	108.492.700	107.337.200	98,93	Efisiensi
		Program Pengelolaan Persampahan	99	92,42	93,35	14.197.697.880	13.779.422.777	97,05	Efisiensi

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Balangan

Untuk menghitung Indeks Kualitas Lahan (IKL), menggunakan persamaan berikut:

$$IKL = 100 - \left((84,3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

Keterangan:

IKL : Indeks Kualitas Lahan

LTL : Luas Tutupan Lahan

LW : Luas Wilayah

DKK : Dampak Kebakaran dan Kanal (Σ RumusWdiTutupanHutan+RumusWdi TutupanBelukar)

Luas Wilayah Kabupaten Balangan adalah **181594.186201Ha**. Untuk data Luas Hutan, Luas Belukar Dalam Kawasan, Luas Belukar pada Fungsi Lindung, Kebun Raya dan DKK di dapat dari pusat dan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Selatan, sedangkan data luasan RTH didapat dari Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Balangan.

Tabel . Data-Data Untuk perhitungan IKL Kabupaten Balangan Tahun 2023

No	Komponen	Nilai (Ha)
1	Luas Hutan	45598.80
2	Luas Belukar dalam Kawasan	20800.66
3	Luas Belukar pada Fungsi Lindung	134.44
4	Kebun Raya (data LIPI)	8.5257
5	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11.3899
6	Taman Kehati	-
7	Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya	125.72
8	RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN)	779.17
9	DKK	0

Berdasarkan data-data pada tabel diatas, perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Balangan tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel . Perhitungan IKL Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
1	Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan	0.32	51.94	0.00	0.32	51.94

Sumber : Perhitungan pada Aplikasi IKLH tahun 2023

Keterangan :

TL = Tutupan Lahan

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

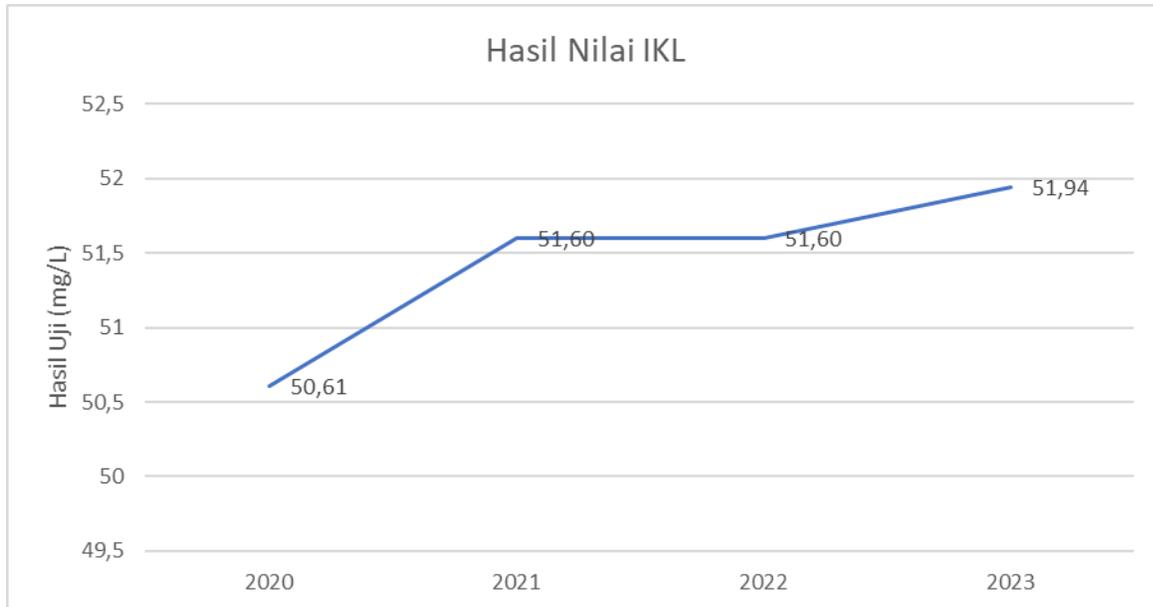
DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal (\sum Rumus W di Tutupan Hutan+RumusW di Tutupan Belukar)

IKL = Indeks Kualitas Lahan

PENENTUAN KATEGORI INDEKS KUALITAS LAHAN

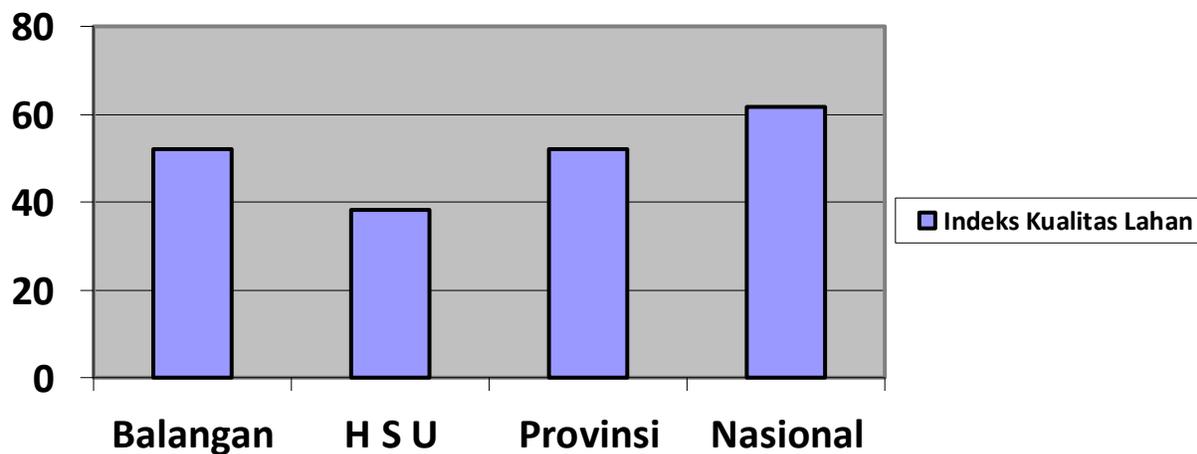
Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Grafik : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lahan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023



Berdasarkan Tabel . Perhitungan IKL Tahun 2023, nilai IKL Kab. Balangan tahun 2023 adalah **51.94**, jika dibandingkan dengan tabel penentuan kategori IKL diatas, maka dengan ini dapat di simpulkan bahwa untuk **Indeks Kualitas Lahan (IKL)** Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah Kategori **Sedang**. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu 51,60. Hal itu karena adanya inventarisasi ulang lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Balangan. Meskipun mengalami kenaikan dari tahun 2022 tetapi belum mencapai target karena adanya pengurangan lahan RTH, perluasan jalan dan pembangunan gedung.

Grafik : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lahan Tahun 2023 Kab, Provinsi dan Nasional



Tabel : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lahan Tahun 2023 Kab, Provinsi dan Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi Terhadap Provinsi	Realisasi Terhadap Nasional
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Lahan	55,67	51,94	38,25	52,08	61,79

Berdasarkan grafik perbandingan capaian kinerja indeks kualitas Lahan tahun 2023 Kabupaten Lain, Provinsi dan Nasional dimana Indeks Kualitas Lahan Kab. Balangan katageori sedang dari capaian Kabupaten lain, Provinsi dan Nasional.

Tabel. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Indikator Indeks Kualitas Lahan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Kualitas Lahan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	68,02	68,24	100,32	1.068.015.300	969.986.530	90,82	Efisiensi
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100	100	100	6.673.715.400	5.478.958.775	82,10	Kurang Efisiensi

4. Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah

Penatagunaan tanah sama dengan pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Penatagunaan tanah memiliki tiga prinsip, yaitu:

1. Prinsip penggunaan aneka

Prinsip ini menghendaki agar penatagunaan tanah harus dapat memenuhi beberapa kepentingan sekaligus pada satu kesatuan tanah tertentu. Prinsip ini mempunyai peranan penting untuk mengatasi keterbatasan areal, terutama di wilayah yang jumlah penduduknya sangat padat.

2. Prinsip penggunaan maksimum

Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang tanah diarahkan untuk memperoleh hasil fisik yang setinggi-tingginya untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang mendesak. Hasil fisik yang dimaksud adalah sesuatu yang dihasilkan dari tanah misalnya sawah menghasilkan padi atau bahan pangan lainnya.

3. Prinsip penggunaan optimum

Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang tanah memberikan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya kepada orang yang menggunakan/mengusahakan tanpa merusak sumber alam itu sendiri.

Penatagunaan tanah pada Pemerintah Kabupaten Balangan ditekankan pada seberapa banyak bidang tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang telah dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Balangan, termasuk seberapa banyak bidang tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang telah mendapatkan sertifikat penggunaan hak pakai dari Badan Pertanahan Nasional. Pengukuran kinerja penatagunaan tanah Pemerintah Kabupaten Balangan diukur dari persentase perbandingan jumlah bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan atau kepentingan umum terhadap keseluruhan bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penatagunaan Tanah} = \frac{\text{Jumlah bidang tanah yang digunakan}}{\text{Jumlah seluruh bidang tanah Pemda}} \times 100\%$$

Data penatagunaan tanah Pemerintah Kabupaten Balangan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jumlah Bidang Tanah Pemerintah Kabupaten Balangan	Jumlah Bidang Tanah Yang Digunakan	Jumlah Bidang Tanah Yang Belum Digunakan	Persentase Penatagunaan Tanah
2.258	2.222	36	98,41%

Permasalahan:

- a. Peningkatan jumlah penduduk sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan.
- b. Belum adanya masterplan pengendalian dan pencemaran sungai.
- c. Penggunaan sumberdaya alternatif yang kurang optimal.
- d. Belum optimalnya pengkajian dan pemanfaatan teknologi terhadap pengolahan air.
- e. Jumlah bidang tanah aset Pemerintah Kabupaten Balangan yang sudah bersertifikat masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bidang tanah aset Pemerintah Kabupaten Balangan. Hal ini berakibat pada kurangnya kredibilitas Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal penatagunaan tanahnya.

- f. Terdapat beberapa bidang tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang masih belum digunakan sehingga kondisinya masih berupa tanah kosong dengan kondisi masih ditumbuhi tanaman dan rerumputan liar.

Solusi:

- a. Bahwasannya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup tidak saja dari pihak aparat saja melainkan juga diperlukan partisipasi masyarakat, adanya komitmen kepala daerah dan dukungan DPRD, serta peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar instansi terkait di setiap daerah.
- b. Meningkatkan penelitian, pengembangan dan penerapan aplikasi teknologi pengendalian dan pencemaran sungai.
- c. Sudah terdapat peraturan tentang pengendalian pencemaran air.
- d. Terdapat peraturan mengenai penegakan hukum lingkungan.
- e. Meningkatkan pendataan aset Pemerintah Daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dalam bidang pertanahan

3. Analisis Sosial Ekonomi SKPD.

Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan yaitu pada tujuan daerah :

A. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan daerah meningkatkan kualitas lingkungan hidup ditetapkan dalam misi daerah ke satu yaitu : Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka sasaran daerah yang ingin di capai adalah agar kualitas lingkungan hidup meningkat dengan indikator kinerja : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Strategi daerah yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran daerah tersebut adalah dengan :

- a) Meningkatkan Indeks Kualitas Air, udara dan lahan.
- b) Meningkatnya Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka strategi daerah tersebut adalah dengan :

1. Pengendalian pencemaran lingkungan;
2. Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup;
3. Pengintegrasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
4. Pengendalian dampak perubahan iklim;
5. Peningkatan peran masyarakat dalam mengelola persampahan;
6. Peningkatan penataan lingkungan hidup sesuai dengan tata ruang;
7. Peningkatan pelayanan pengelolaan izin lokaso dan izin membuka tanah;
8. Peningkatan penatagunaan tanah;
9. Peningkatan pelayanan penyelesaian sengketa tanah garapan;
10. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap SDA dan Lingkungan Hidup;
11. Peningkatan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengoptimalkan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam peningkatan kualitas SDA dan LH;
12. Peningkatan pelayanan publik terhadap pengelolaan LH;
13. Pengembangan kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Balangan;
14. Penambahan jumlah pegawai sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;
15. Pengadaan sarana dan prasarana operasional;
16. Akreditasi Laboratorium lingkungan;
17. Peningkatan fasilitasi pelayanan dalam legalisasi asset (sertifikasi) milik Pemerintah Daerah;
18. Peningkatan Inventarisasi tanah milik Pemerintah Daerah.

Pada program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup ada beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan sosial ekonomi masyarakat diantaranya adalah Program pengelolaan persampahan dan Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati).

Keberadaan sampah saat ini telah menjadi masalah nasional, maka kedepannya diharapkan pengelolaannya dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.

Persampahan domestik saat ini lebih banyak dimusnahkan dengan metode in-situ, yaitu dengan dibakar dan dibuang ke lahan-lahan kosong sekitar perumahan. Sementara untuk sampah pasar dan sebagian perumahan perkotaan dikumpulkan dan diangkut ke TPA Batu Merah. Kegiatan pengelolaan sampah eksisting di Kabupaten Balangan dilakukan dengan cara pengumpulan oleh masyarakat/petugas yang ditunjuk, sampah yang diangkut dari wadah-wadah rumah/persil kemudian dimuat ke gerobak-gerobak untuk selanjutnya dimasukkan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Sampah-sampah yang dipilah dapat dijual kembali ke pengepul sampah sedangkan sampah basah dimanfaatkan menjadi maggot atau dijadikan pupuk organik dan sampah yang tidak terpakai di angkut ke TPA. Dari kegiatan pemanfaatan sampah tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari pengelolaan persampahan.

Ketersediaan ruang terbuka dan Ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Balangan Regulasi yang mengatur batasan minimal sebesar 30% RTH harus dipenuhi secara bertahap. Proses pelaksanaannya memerlukan strategi terobosan untuk dapat membangun RTH publik di Kabupaten Balangan dengan diiringi kualitas dan sebarannya dari tingkat kota, kecamatan, desa kelurahan sampai dusun/lingkungan yang ideal bagi lingkungan yang seimbang. RTH di permukiman padat di pusat kota atau lingkungan cepat tumbuh menjadi kendala karena ketersediaan lahan.

Ruang terbuka hijau (RTH) dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan membuka usaha dari makan minum, cinderamata, jasa penyewaan, penginapan, dll sehingga masyarakat dapat manfaat lebih dari ruang terbuka hijau.

Sosial, ruang terbuka hijau merupakan tempat/media masyarakat untuk saling berinteraksi mendapatkan kebutuhan rekreatif. RTH juga berfungsi sebagai kegiatan sosial ini terlihat pada beberapa RTH kemudian peran atau fungsi dari RTH sangat terlihat bahwa sumber perekonomian masyarakat dapat terbantu oleh adanya kunjungan masyarakat di RTH.

4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategi berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan antara lain sebagai berikut:

a. Menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup

Berdasarkan isu strategis untuk Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut diatas bila dibandingkan dengan kondisi yang ada, maka untuk menangani isu strategis tersebut perlu diketahui adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang mungkin timbul sebagai berikut:

1. Kekuatan

- Komitmen Pimpinan;
- Regulasi, seperti peraturan perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Potensi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ditandai dengan adanya sertifikat;
- Adanya perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk standardisasi meliputi pengujian, kompetensi personil, sistem manajemen lingkungan, dan ekolabel;
- Adanya program-program inovatif yang telah dihasilkan seperti, Adipura, Adiwiyata, Menuju Indonesia Hijau, Eco-Office, dll.
- Kelembagaan;
- Kebijakan operasional;

2. Kelemahan

- Keterbatasan sarana dan prasarana kerja;
- Keterbatasan jumlah sumber daya manusia;
- Keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;
- Keterbatasan *databases* serta informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

3. Peluang

- Koordinasi dan konsultasi;
- Isu lingkungan telah menjadi isu global;
- Kerjasama dengan instansi terkait;
- Kearifan lokal;
- Adanya perkembangan kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi nonpemerintah;
- Tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Tantangan

- Isu lingkungan belum menjadi suatu peluang untuk pembangunan ekonomi;
- Berbagai bencana alam
- Kemiskinan
- Adanya Kepala Daerah yang masih lemah dengan penerapan komitmen pelestarian lingkungan hidup;
- Peningkatan sistem penegakan hukum;
- Pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat sehingga memicu konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam baik antarwilayah, antarpusat dan daerah, serta antarpenggunaan.
- Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih perlu ditingkatkan dengan membiasakan perilaku yang ramah lingkungan.

Berdasarkan isu strategis RPJMD dan kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan di atas menjadi landasan bagi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan untuk membuat perumusan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Cakupan Penanganan Sampah
- b. Menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup
- c. Penurunan kualitas dan kuantitas air sungai sebagai sumber air bersih dan adanya intrusi air laut.
- d. Peningkatan polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan serta emisi gas buang kendaraan bermotor daerah perkotaan.
- e. Kurangnya tutupan lahan berupa vegetasi hijau;
- f. Permasalahan efek Gas Rumah Kaca
- g. Banjir dan longsor
- h. Meningkatnya kerugian Negara akibat hak-hak Negara dan rakyat yang hilang dalam pemanfaatan SDA dan LH oleh kelompok masyarakat atau pelaku usaha/kegiatan.
- i. Belum optimalnya upaya konservasi SDA;
- j. Terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang.
- k. Belum optimalnya penataan peraturan dan perundangan LH oleh stakeholder (pelaku usaha) dan masyarakat;
- l. Berkurangnya daerah tangkapan air;
- m. Permasalahan sosial kemasyarakatan sehingga perlu perencanaan sosial yang baik dalam penguatan partisipasi masyarakat.
- n. Belum Optimalnya pengelolaan tanah Pemerintah Kabupaten Balangan, secara administrasi maupun secara fisik.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 berdasarkan program dan kegiatan yang telah termuat dalam Renstra tahunan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Balangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	11.870.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Balangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	17.622.675.110,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	120.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	133.893.500,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	70.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	66.358.500,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	67.535.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	8.100.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	9.246.880.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	8.000.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	9.150.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	46.880.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	50.000.000,00

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	105.247.500,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Balangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	100.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Balangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	55.247.500,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	100.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	50.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1.600.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	2.952.902.800,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	100.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	93.091.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	400.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	806.331.800,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kab. Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	1	50.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kab. Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	1	49.700.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	50.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	9.560.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	665	1.000.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	665	1.994.220.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	750.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	1.935.246.400,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	50.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	651.964.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Balangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	50.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Balangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	517.339.000,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	50.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	765.943.400,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	2.900.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	1.924.455.760,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	36.200.000,00

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	339.231.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	50.998.400,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	500.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.498.026.360,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1.200.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1.324.049.150,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	347.299.000
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	900.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	976.750.150
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Balangan	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100	200.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Balangan	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100	1.523.134.000,00
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100	200.000.000,00	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100	1.234.576.200,00
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	200.000.000,00	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	190.976.600,00
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	3	200.000.000,00	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	3	1.043.599.600,00
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100	418.880.000,00	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100	288.557.800,00
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	418.880.000,00	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	117.857.800,00

	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1	418.880.000,00	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1	170.700.000,00
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Balangan	Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup	100	2.320.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Balangan	Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup	100	2.264.998.900,00
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Kualitas Lingkungan yang Memenuhi Baku Mutu	100	2.220.000.000,00	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Kualitas Lingkungan yang Memenuhi Baku Mutu	100	2.164.998.900,00
	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Kab. Balangan	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	170.000.000	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Kab. Balangan	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	100.000.000
	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Balangan	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	8	250.000.000	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Balangan	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	8	145.000.000
	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Kab. Balangan	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1	600.000.000	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Kab. Balangan	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1	449.999.600
	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Kab. Balangan	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	600.000.000	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Kab. Balangan	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	70.000.000
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	600.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	1.399.999.300
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100.000.000,00	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Balangan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	4	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Balangan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	4	100.000.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Balangan	Persentase Peningkatan Keaneekaragaman Hayati	100	8.000.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Balangan	Persentase Peningkatan Keaneekaragaman Hayati	100	10.114.934.500,00
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase pengelolaan keaneekaragaman hayati	100%	8.000.000.000,00	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase pengelolaan keaneekaragaman hayati	100%	10.114.934.500,00
	Pengelolaan Kebun Raya	Kab. Balangan	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8,4	1.000.000.000	Pengelolaan Kebun Raya	Kab. Balangan	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8,4	2.684.272.100

	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Balangan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	112,221	7.000.000.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Balangan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	112,221	7.430.662.400
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Balangan	Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3	100	100.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Balangan	Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3	100	50.000.000,00
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Balangan	Persentase Pengurangan dan Penanganan Limbah B3	100%	100.000.000,00	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Balangan	Persentase Pengurangan dan Penanganan Limbah B3	100%	50.000.000,00
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3	100.000.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3	50.000.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Balangan	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan	100	200.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Balangan	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan	100	500.000.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	100%	200.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	100%	500.000.000,00
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Balangan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	100.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Balangan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	100.000.000
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	7	100.000.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	7	400.000.000
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Balangan	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	100	1.000.000.000,00	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Balangan	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	100	49.999.300,00

	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Balangan	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	100%	1.000.000.000,00	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Balangan	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	100%	49.999.300,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	1.000.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	49.999.300
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Balangan	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	300.000.000,00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Balangan	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	109.940.900,00
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten	100%	300.000.000,00	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten	100%	109.940.900,00
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3	300.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3	109.940.900
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Balangan	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	100.000.000,00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Balangan	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	75.000.000,00
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100%	100.000.000,00	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100%	75.000.000,00
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	3	100.000.000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	3	75.000.000
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Balangan	Persentase Pengelolaan Persampahan	99	16.500.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Balangan	Persentase Pengelolaan Persampahan	99	9.964.743.600,00
	Pengelolaan Sampah	Kab. Balangan	Persentase Wilayah yang Bersih	100	16.500.000.000,00	Pengelolaan Sampah	Kab. Balangan	Persentase Wilayah yang Bersih	100	9.964.743.600,00

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5	8.000.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5	1.067.178.000
	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Balangan	Jumlah sampah yang terdaur ulang	3300	1.500.000.000	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Balangan	Jumlah sampah yang terdaur ulang	3300	1.499.701.000
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Balangan	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1500	7.000.000.000	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Balangan	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1500	7.397.864.600
11	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kab. Balangan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100	100.000.000,00	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kab. Balangan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100	178.000.000,00
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100.000.000,00	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	178.000.000,00
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	100.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	178.000.000
12	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Kab. Balangan	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100	100.000.000,00	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Kab. Balangan	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100	20.000.000,00
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah	100	100.000.000,00	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah	100	20.000.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1	100.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1	20.000.000
13	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Kab. Balangan	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	100	3.551.037.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Kab. Balangan	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	100	776.000.000,00
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kab. Balangan	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	100	3.551.037.400,00	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kab. Balangan	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	100	776.000.000,00
	Koordinasi dan sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	10	1.775.518.700,00	Koordinasi dan sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	10	776.000.000,00

14	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kab. Balangan	Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah	100	1.775.518.700,00	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kab. Balangan	Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah	100	785.999.500,00
	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100	1.775.518.700,00	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100	785.999.500,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	1.775.518.700,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	785.999.500,00
	TOTAL				44.341.037.400,00					44.035.425.810,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Program/Kegiatan.

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a. Program Penatagunaan Tanah
- b. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
- c. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- d. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- e. Program Pengelolaan Izin Lokasi
- f. Program Pengelolaan Persampahan

- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- i. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- j. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH.
- k. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- l. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- m. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- n. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- o. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- p. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2026 adalah Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.

Indikator Tujuannya adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas lahan

Sasaran Kinerja Utama yang akan dicapai adalah Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas lahan.

Tabel. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas lahan	67.12	67.57	68.02	68.48	68.93	69.38
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.	Meningkatnya Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	-	-	-	100%	100%	100%

3. Program dan Kegiatan Prioritas Pendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Balangan	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100	1.523.134.000,00
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100	1.234.576.200,00
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	190.976.600,00
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	3	1.043.599.600,00
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100	288.557.800,00
2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	117.857.800,00
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1	170.700.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Balangan	Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup	100	2.264.998.900,00

	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Kualitas Lingkungan yang Memenuhi Baku Mutu	100	2.164.998.900,00
	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Kab. Balangan	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	100.000.000
	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Balangan	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	8	145.000.000
	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Kab. Balangan	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1	449.999.600
	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Kab. Balangan	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	70.000.000
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	1.399.999.300
3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Balangan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	4	100.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Balangan	Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati	100	10.114.934.500,00
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	100%	10.114.934.500,00
4	Pengelolaan Kebun Raya	Kab. Balangan	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8,4	2.684.272.100
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Balangan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	112,221	7.430.662.400
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Balangan	Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3	100	50.000.000,00
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Balangan	Persentase Pengurangan dan Penanganan Limbah B3	100%	50.000.000,00
5	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3	50.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Balangan	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan	100	500.000.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	100%	500.000.000,00
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Balangan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	100.000.000

6	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	7	400.000.000
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Balangan	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	100	49.999.300,00
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Balangan	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	100%	49.999.300,00
7	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	49.999.300
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Balangan	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	109.940.900,00
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten	100%	109.940.900,00
8	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3	109.940.900
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Balangan	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	75.000.000,00
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100%	75.000.000,00
9	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	3	75.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Balangan	Persentase Pengelolaan Persampahan	99	9.964.743.600,00
	Pengelolaan Sampah	Kab. Balangan	Persentase Wilayah yang Bersih	100	9.964.743.600,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5	1.067.178.000
	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Balangan	Jumlah sampah yang terdaur ulang	3300	1.499.701.000

10	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Balangan	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1500	7.397.864.600
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kab. Balangan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100	178.000.000,00
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	178.000.000,00
11	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	178.000.000
	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Kab. Balangan	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100	20.000.000,00
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah	100	20.000.000,00
12	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1	20.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Kab. Balangan	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	100	776.000.000,00
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kab. Balangan	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	100	776.000.000,00
	Koordinasi dan sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	10	776.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah pada RPJMD Dinas Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan sedangkan sasaran strategis yang terkait dengan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yakni Meningkatnya indeks lingkungan hidup.

Pada Renstra Tahun 2021 – 2026 terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yakni:

1. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan
2. Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah

Tabel . Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	50.1	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5	50.6
			Indeks Kualitas Udara	90.94	90.94	91.05	91.16	91.27	91.38	91.49
			Indeks Kualitas Lahan	52.3	52.3	53.99	55.67	57.36	59.05	60.74
		Meningkatnya penatagunaan tanah pemerintah daerah	Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah	-	-	-	100	100	100	100

Tabel. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Kab. Balangan	74	17.622.675.110,00	APBD		74	11.370.000.000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	Kab. Balangan	100	133.893.500,00	APBD		100	170.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kab. Balangan	2	66.358.500,00	APBD		2	100.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kab. Balangan	4	67.535.000,00	APBD		4	70.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	%	Kab. Balangan	100%	9.246.880.000,00	APBD		100%	9.600.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Kab. Balangan	46	9.150.000.000,00	APBD		50	9.500.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Kab. Balangan	1	46.880.000,00	APBD		1	50.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Kab. Balangan	4	50.000.000,00	APBD		4	50.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	%	Kab. Balangan	100%	105.247.500,00	APBD		100%	150.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Kab. Balangan	1	55.247.500,00	APBD		2	100.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kab. Balangan	10	50.000.000,00	APBD		10	50.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	%	Kab. Balangan	100%	2.952.902.800,00	APBD		100%	100.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Balangan	4	93.091.000	APBD		4	100.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Balangan	13	806.331.800,00	APBD		2	50.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	Kab. Balangan	1	49.700.000,00	APBD		1	50.000.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kab. Balangan	1	9.560.000,00	APBD		1	10.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kab. Balangan	665	1.994.220.000,00	APBD		300	1.000.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	%	Kab. Balangan	100%	1.935.246.400,00	APBD		100%	50.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Kab. Balangan	1	651.964.000,00	APBD		1	500.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Kab. Balangan	1	517.339.000,00	APBD		1	500.000.000,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kab. Balangan	4	765.943.400,00	APBD		2	300.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	%	Kab. Balangan	100%	1.924.455.760,00	APBD		100%	400.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kab. Balangan	12	36.200.000,00	APBD		12	50.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kab. Balangan	12	339.231.000,00	APBD		12	350.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kab. Balangan	12	50.998.400,00	APBD		12	60.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kab. Balangan	12	1.498.026.360,00	APBD		12	250.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	%	Kab. Balangan	100%	1.324.049.150,00	APBD		100%	250.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kab. Balangan	10	347.299.000	APBD		10	350.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kab. Balangan	1	976.750.150	APBD		1	200.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	%	Kab. Balangan	100	1.523.134.000,00	APBD		100	2.700.000.000,00
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	%	Kab. Balangan	100	1.234.576.200,00	APBD		100	300.000.000,00
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Kab. Balangan	1	190.976.600,00	APBD		1	200.000.000
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen	Kab. Balangan	3	1.043.599.600,00	APBD		3	100.000.000
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	%	Kab. Balangan	100	288.557.800,00	APBD		100	400.000.000,00
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	Kab. Balangan	1	117.857.800,00	APBD		1	200.000.000,00

Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	Kab. Balangan	1	170.700.000,00	APBD		1	200.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup	%	Kab. Balangan	100	2.264.998.900,00	APBD		100	2.200.000.000,00
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Lingkungan yang Memenuhi Baku Mutu	%	Kab. Balangan	100	2.164.998.900,00	APBD		100	2.100.000.000,00
Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen	Kab. Balangan	1	100.000.000	APBD		1	100.000.000,00
Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	Kab. Balangan	8	145.000.000	APBD		8	200.000.000,00
Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan	Kab. Balangan	1	449.999.600	APBD		1	200.000.000
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	Kab. Balangan	1	70.000.000	APBD		1	100.000.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	Kab. Balangan	1	1.399.999.300	APBD		1	1.500.000.000,00
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	Kab. Balangan	100	100.000.000,00	APBD		100	100.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Kab. Balangan	4	100.000.000	APBD		4	100.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati	%	Kab. Balangan	100	10.114.934.500,00	APBD		100	9.500.000.000,00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	%	Kab. Balangan	100%	10.114.934.500,00	APBD		100%	9.500.000.000,00
Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	Kab. Balangan	8,4	2.684.272.100	APBD		8,4	2.000.000.000,00
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	Kab. Balangan	112,221	7.430.662.400	APBD		112,221	7.500.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3	%	Kab. Balangan	100	50.000.000,00	APBD		100	50.000.000,00
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Pengurangan dan Penanganan Limbah B3	%	Kab. Balangan	100%	50.000.000,00	APBD		100%	50.000.000,00
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	Kab. Balangan	3	50.000.000	APBD		3	50.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan	%	Kab. Balangan	100	500.000.000,00	APBD		100	600.000.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	%	Kab. Balangan	100%	500.000.000,00	APBD		100%	600.000.000,00

Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Rekomendasi	Kab. Balangan	1	100.000.000	APBD		1	100.000.000
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	Kab. Balangan	7	400.000.000	APBD		10	500.000.000
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	%	Kab. Balangan	100	49.999.300,00	APBD		100	50.000.000,00
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	%	Kab. Balangan	100%	49.999.300,00	APBD		100%	50.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen	Kab. Balangan	1	49.999.300	APBD		1	50.000.000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	Kab. Balangan	100	109.940.900,00	APBD		100	200.000.000,00
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah	Kab. Balangan	100%	109.940.900,00	APBD		100%	200.000.000,00
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	Kab. Balangan	3	109.940.900	APBD		4	200.000.000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	Kab. Balangan	100	75.000.000,00	APBD		100	100.000.000,00
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	Kab. Balangan	100%	75.000.000,00	APBD		100%	100.000.000,00
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	Kab. Balangan	3	75.000.000	APBD		4	100.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	%	Kab. Balangan	99	9.964.743.600,00	APBD		99	10.200.000.000,00
Pengelolaan Sampah	Persentase Wilayah yang Bersih	%	Kab. Balangan	100	9.964.743.600,00	APBD		100	10.200.000.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	Kab. Balangan	5	1.067.178.000	APBD		5	1.200.000.000
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton	Kab. Balangan	3300	1.499.701.000	APBD		3300	1.500.000.000

Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	Kab. Balangan	1500	7.397.864.600	APBD		1500	7.500.000.000
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	Kab. Balangan	100	178.000.000,00	APBD		100	200.000.000,00
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	Kab. Balangan	100	178.000.000,00	APBD		100	200.000.000,00
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Kab. Balangan	2	178.000.000			2	200.000.000
Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	%	Kab. Balangan	100	20.000.000,00			100	50.000.000,00
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah	%	Kab. Balangan	100	20.000.000,00			100	50.000.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokumen	Kab. Balangan	1	20.000.000			1	50.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	%	Kab. Balangan	100	776.000.000,00			100	750.000.000,00
Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	%	Kab. Balangan	100	776.000.000,00			100	750.000.000,00
Koordinasi dan sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	Kab. Balangan	10	776.000.000,00			10	750.000.000,00
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah	%	Kab. Balangan	100	785.999.500,00			100	800.000.000,00
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	%	Kab. Balangan	100	785.999.500,00	APBD		100	800.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Kab. Balangan	2	785.999.500,00	APBD		2	800.000.000,00

BAB VII

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan ini disusun sebagai arah kebijakan kegiatan perencanaan yang akan direalisasikan pada tahun 2025 mendatang. Renja ini merupakan penjabaran empiris dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, khususnya yang berkenaan dengan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, di lain pihak pembuatan Renja ini juga sebagai perwujudan atas tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan zaman harus dijalankan secara efisien dan efektif, berdayaguna dan berhasil guna serta harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ***“Good Governance.”***

Dengan demikian, keberadaan konsepsi Renja oleh setiap SOPD sangat diperlukan dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan fungsi dan peran SOPD yang bersangkutan agar dapat diciptakan kondisi yang maju dan proporsional secara terencana, sistematis, terarah, bertahap dan berkesinambungan.

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup menyadari benar bahwa, kinerja pemerintahan ini akan sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih memwirausahakan birokrasi pemerintah. Dengan kata lain mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (***Inputs Oriented Accountability***) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (***Results Oriented Accountability***). Kita bersama tentunya tidak ingin lagi ada instansi pemerintah yang tidak jelas kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat.

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mendorong agar penyelenggaraan pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Balangan dapat dilaksanakan dengan berprinsip pada tata pemerintahan yang baik yang menuju kepada pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*Results Oriented Government*).

Terakhir, bahwa Renja ini bersifat intern dan dinamis. Artinya dipergunakan untuk kalangan terbatas pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, namun bersifat fleksibel terhadap berbagai macam perubahan dan tuntutan baik yang dimunculkan oleh lingkungan internal maupun eksternal. Dinamis, berarti Renja Tahun 2025 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 yang harus mampu menggambarkan kondisi yang jauh lebih baik dari pada kondisi-kondisi sebelumnya dan harus mampu memberikan arahan bagi peningkatan dan pengembangan kondisi selanjutnya.

Parindin, Agustus 2024.
Kepala Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup.



Aidin G. S. Sos, MM
NIP. 19630617 198509 1 001